

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang apa dan siapa PPAT*, (Malang: Selaras, 2013)
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenamedia, 2015)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang apa dan Siapa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)*, (Malang: Selaras, 2013)
- Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015)
- Efendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991)
- _____, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2006)
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Maju Mundur, 1995)
- Hotma Pardomuan Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Krakatauw Book, 2009)
- J. Andy Hartanto, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat, Cetakan Ke-2*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2012)

- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat, cetakan kedua*, (Jakarta: Gramedia, 2000)
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Mardiasomo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001)
- Marihot P Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Mustofa, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, (Yogyakarta: Karya Media, 2010)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Subekti, *Aneka Perjanjian Cetakan kesepuluh*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- _____, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010)
- Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Serang: IAIN Suhada Press, 2009)

Udin Narsudin, *Tanya Jawab Persoalan Substansi Notaris & PPAT dalam Praktek*, (Jakarta: KUMbro, 2018)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan /atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peratutan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

